

DEFORESTASI DAN INDUSTRI SAWIT DI INDONESIA: ANTARA KEPENTINGAN EKONOMI DAN KRISIS EKOLOGI

Nur'aini fadlilah¹⁾ Afifah Khoirunnisa²⁾ Baeti Kurniasih³⁾ Aqilla Reztra Dawanasavia⁴⁾ Lavia Permatasari⁵⁾ Ogyan Prayogo⁶⁾

Email: ainifadlilah38@students.unnes.ac.id

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

Dikirimkan: 21 Desember 2025 Direvisi: 12 Juni 2026 Diterbitkan: 12 Juni 2026

INTISARI

Deforestasi di Indonesia berkaitan erat dengan ekspansi industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional. Meskipun berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa negara, perluasan perkebunan sawit telah mendorong hilangnya tutupan hutan, degradasi lingkungan, dan konflik agraria. Artikel ini menganalisis deforestasi sawit dalam perspektif politik lingkungan dengan menelaah relasi kuasa antara negara, korporasi, masyarakat lokal, dan aktor global. Metode penelitian menggunakan studi literatur terhadap berbagai penelitian dan dokumen kebijakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan cenderung bersifat normatif dan belum efektif akibat lemahnya implementasi, penegakan hukum, serta dominasi kepentingan industri. Tekanan pasar global dan wacana keberlanjutan turut mereproduksi ketimpangan struktural. Artikel ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih transformatif dan berkeadilan ekologis.

Kata kunci: Deforestasi, keberlanjutan, kelapa sawit, politik lingkungan

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas di dunia yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. Hutan berperan sebagai penyangga kehidupan melalui penyediaan jasa lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengendalian perubahan iklim. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi permasalahan deforestasi yang cukup serius akibat alih fungsi lahan untuk berbagai kepentingan pembangunan, terutama sektor perkebunan dan industri ekstraktif. Deforestasi tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial dan politik yang kompleks.

Korespondensi:

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Gedung FISIP, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah (50229).

Email: ainifadlilah38@students.unnes.ac.id.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap deforestasi di Indonesia adalah ekspansi industri kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber devisa negara, penciptaan lapangan kerja, maupun penggerak pembangunan daerah. Indonesia bahkan tercatat sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 16 juta hektare. Permintaan global yang tinggi terhadap minyak sawit untuk kebutuhan pangan, kosmetik, dan biofuel mendorong pembukaan lahan secara masif, yang dalam praktiknya sering kali dilakukan dengan mengonversi kawasan hutan alam.

Di sisi lain, ekspansi industri sawit menimbulkan dampak ekologis yang signifikan. Hilangnya tutupan hutan menyebabkan degradasi lingkungan, rusaknya habitat satwa liar, meningkatnya emisi karbon, serta memperparah risiko bencana ekologis seperti banjir dan kebakaran hutan. Selain dampak lingkungan, ekspansi sawit juga kerap memicu konflik agraria, perampasan lahan masyarakat adat, serta ketimpangan sosial akibat lemahnya perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

Permasalahan deforestasi dan industri sawit tidak dapat dilepaskan dari konteks politik lingkungan di Indonesia. Politik lingkungan mencerminkan bagaimana negara mengelola sumber daya alam melalui kebijakan, regulasi, dan keterlibatan berbagai aktor, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta aktor global. Meskipun konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, implementasinya sering kali menghadapi tantangan berupa lemahnya tata kelola, tumpang tindih perizinan, serta praktik korupsi dalam pengelolaan lahan.

Sebagai respons atas meningkatnya deforestasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Kebijakan Satu Peta, serta program restorasi gambut dan rehabilitasi hutan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi kendala dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi antar lembaga. Studi kasus deforestasi di Subulussalam, Aceh, misalnya, menunjukkan bahwa aktivitas pembukaan lahan sawit tanpa izin masih terjadi bahkan di kawasan lindung, sehingga menegaskan lemahnya implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, deforestasi dan industri sawit di Indonesia menjadi isu penting untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam kerangka politik lingkungan. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana kepentingan ekonomi, kebijakan negara, serta aspek keberlanjutan lingkungan saling berinteraksi dan berkonflik. Dengan memahami permasalahan ini secara komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah menjelaskan hubungan antara ekspansi kelapa sawit dan deforestasi dari perspektif lingkungan, ekonomi, maupun tata

kelola sumber daya alam. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak ekologis atau kontribusi ekonomi industri sawit, sementara kajian yang menempatkan deforestasi sebagai persoalan politik lingkungan yang melibatkan relasi kuasa antara negara, korporasi, masyarakat lokal, dan aktor global masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis deforestasi akibat ekspansi sawit melalui perspektif politik lingkungan untuk memahami bagaimana konfigurasi kepentingan ekonomi dan struktur kekuasaan membentuk tata kelola lingkungan di Indonesia. Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan perspektif politik lingkungan untuk menjelaskan hubungan antara ekspansi industri sawit dan deforestasi di Indonesia. Artikel ini tidak hanya membahas dampak lingkungan dari perluasan perkebunan sawit, tetapi juga menganalisis bagaimana relasi kuasa antara negara, korporasi, masyarakat lokal, dan aktor global membentuk kebijakan serta praktik pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, artikel ini menawarkan pembacaan yang lebih politis terhadap deforestasi sebagai persoalan tata kelola dan kontestasi kepentingan, bukan semata-mata persoalan teknis lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga pemerintah dan organisasi internasional, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan deforestasi, industri kelapa sawit, dan politik lingkungan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses identifikasi, kategorisasi, dan sintesis berbagai temuan penelitian untuk memahami relasi antara kepentingan ekonomi, kebijakan negara, dan krisis ekologis dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia.

Literature Review

Deforestasi

Addinul Yakin dalam (Rahman & Zahra, 2022) menjelaskan bahwa deforestasi merupakan kondisi luas hutan yang mengalami penurunan secara permanen disebabkan ulah manusia berupa kegiatan konversi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, Perkebunan, dan pertambangan. Banyak studi lain yang menekankan bahwa deforestasi bukan sekedar hilangnya pohon, namun merujuk pada dampak ekologis jangka panjang seperti penurunan keanekaragaman hayati, gangguan fungsi ekosistem, dan degradasi tanah (Sunderlin & Resosudarmo, 1997). Dalam konteks Indonesia, deforestasi sering dikaitkan dengan perubahan tata guna lahan untuk kegiatan ekonomi. Margono dalam (Austin, Schwantes, Gu, & Kasibhatla, 2019) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kehilangan hutan primer tertinggi di daerah tropis.

Berdasarkan data dari Kementerian kehutanan menunjukkan angka deforestasi netto tahun 2024 sebesar 175,4 ribu hektar dimana 92% deforestasi terjadi di hutan sekunder dan 69% terjadi dalam Kawasan hutan dan sisanya di luar Kawasan hutan (Krisdianto, 2025). Sebelumnya data historis menunjukkan bahwa pada periode 1985-1998 laju kehilangan hutan mencapai 1,6-1,8 juta ha per tahun dan pada awal tahun 2000 menjadi 2 juta ha per tahun, sebelum tren mengalami penurunan pada pertengahan 2013 (FWI, 2020). Data *Global Forest Watch* mencatat bahwa

Indonesia kehilangan sekitar 30,8 juta ha hutan antara tahun 2001-2023. Jika angka deforestasi terus mengalami peningkatan, maka akan menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan dan merugikan makhluk hidup disekitar termasuk manusia (Rahman & Zahra, 2022). Dampak tersebut dapat berupa bencana alam (banjir, tanah longsor, siklon tropis) hingga perubahan iklim yang disebabkan hilangnya populasi pohon-pohon dalam hutan.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Austin, Schwantes, Gu, & Kasibhatla, 2019) mengungkap bahwa penyebab deforestasi di Indonesia karena beberapa hal. Penelitian tersebut menemukan bahwa Perkebunan kelapa sawit menjadi pendorong utama dari deforestasi sebesar 23%, perluasan penebangan kayu sebesar 21%, konversi hutan menjadi padang rumput/Semak sebesar 20%, ekspansi pertanian skala kecil dan Perkebunan campuran skala kecil 22%, dan kegiatan lain seperti pertambangan, tambak ikan, dll 5% (Austin, Schwantes, Gu, & Kasibhatla, 2019). Sedangkan Ariana dalam (Rahman & Zahra, 2022) memperkirakan bahwa 57% deforestasi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perubahan lahan menjadi lahan Perkebunan dan 20% bersumber dari pulp dan kertas.

Selaras dengan hal tersebut (Fasya, Praza, & Fariadi, 2021) dalam studi kasus bencana banjir di Aceh menunjukkan bahwa sawit menjadi penyebab krisis lingkungan dan kerugian yang diterima masyarakat akibat deforestasi dan Perkebunan ilegal. Analisis dalam penelitian lain mengidentifikasi bahwa deforestasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, namun merupakan hasil interaksi antara permintaan pasar, dinamika demografi, dan pola alih guna lahan yang kompleks. (Widiono, 2024).

Industri sawit

Industri sawit merupakan komoditas penting yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan dalam sektor ekonomi. Data dari Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit menunjukkan bahwa selama dekade terakhir, Indonesia secara konsisten menjadi pengeksport minyak sawit terbesar di dunia yang berhasil memenuhi sekitar 52% permintaan kebutuhan global (Martalita, Robiani, Rohima, & Yulianita, 2025). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat bahwa sekitar 80% nilai ekspor non-minyak dan gas pada tahun 2024 didominasi oleh sektor industri, termasuk minyak kelapa sawit yang memiliki peran penting bagi pasar domestik dan internasional. Pada tahun 2024, komposisi produksi minyak sawit mentah di Indonesia menunjukkan bahwa 68% disumbangkan oleh Perkebunan swasta skala besar, 34,46% oleh Perkebunan skala kecil, dan hanya 4,67% oleh Perusahaan milik negara (Widiono, 2024).

Berdasarkan data dari *Our World In Data* mencatat bahwa total luas lahan yang digunakan untuk Perkebunan kelapa sawit meningkat drastis sebesar 144% dari tahun 2010 hingga 2023 dengan tingkat pertumbuhan dari 5,78 juta ha menjadi 14,17 juta ha. Penelitian dari (Riani & Dermawan, 2025) menunjukkan bahwa ekspor minyak sawit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2001-2023. Minyak sawit menjadi salah satu komoditas utama yang mendorong peningkatan aktivitas ekspor dan ekonomi makro lainnya. Industri minyak sawit juga memiliki dampak positif pada sisi sosial ekonomi.

Berdasarkan analisis di provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Perkebunan kelapa sawit menjadi sumber pendapatan penting dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rumah tangga di wilayah tersebut (Feninda, 2023). Industri minyak sawit juga memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan dan energi. Dalam konteks kebijakan energi nasional, sawit diposisikan sebagai bahan baku utama energi terbarukan yang diharapkan mampu mengurangi angka ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Kepentingan ekonomi dan krisis ekologi

Beberapa literatur terkait industri sawit di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan tajam antara manfaat ekonomi yang signifikan dengan dampak ekologis yang serius akibat ekspansi lahan sawit salah satunya adalah deforestasi. Secara ekonomi penelitian menyatakan bahwa industri sawit menjadi komoditas strategis yang memiliki kontribusi penting terhadap devisa negara sekaligus sumber penghidupan bagi jutaan tenaga kerja khususnya di lingkungan sekitar industri. Di sisi lain, kajian lingkungan menunjukkan bahwa perluasan lahan sawit berkontribusi terhadap deforestasi, bencana ekologis, serta peningkatan emisi karbon (Widiono, 2024). Masifnya industri sawit yang tidak terkendali merefleksikan ketegangan struktural antara kepentingan nasional dengan risiko krisis ekologi yang menyertainya. Selain itu arah pembangunan Indonesia perlu dipertanyakan untuk menjawab ketegangan yang terjadi.

Penelitian dari (Ulfa & Iksanto, 2018) menemukan bahwa kebijakan tata kelola industri sawit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia berfokus pada peningkatan daya saing dan ekspor, sedangkan implementasinya dalam prinsip tata kelola hutan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masih lemah. Hal tersebut memberikan peluang bagi kepentingan industri untuk mempengaruhi proses regulasi sehingga lebih menguntungkan pelaku usaha dan memperlemah perlindungan ekologi. Berdasarkan hasil analisis dalam modul dari (Putri, n.d.) menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan ditunjukkan pada bagaimana ekonomi dan Lembaga-lembaga ekonomi dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat “mengarahkan” manusia untuk membuat Keputusan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Selain aspek ekonomi yang mendorong masifnya pembangunan sawit, aspek kelembagaan juga telah menempatkan pemerintah dalam posisi yang rentan terhadap pengaruh industri. Dominasi Perusahaan swasta berskala besar dalam produksi minyak sawit mentah sebanyak 68% menunjukkan tingginya konsentrasi kepentingan ekonomi dalam industri sawit Indonesia. Kondisi tersebut membuka peluang bagi korporasi dengan kontribusi signifikan terhadap devisa dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik pengawasan negara. Penelitian dari (Noerdin & Mar'iyah, 2024) menjelaskan bahwa kebijakan hutan tanaman industri telah menguntungkan Perusahaan besar. Interaksi antara negara dan korporasi berujung pada kebijakan yang dimanfaatkan oleh Perusahaan sehingga terjadi ekspansi lahan yang melewati batas tata aturan formal.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Fred block dalam bukunya “*The Revising State Theory*” menyimpulkan bahwa komunitas bisnis memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan kebijakan negara dan bahwa pelaku bisnis mencari bantuan pemerintah untuk mendukung kegiatan dan keuntungan mereka melalui berbagai kebijakan (Noerdin & Mar’iyah, 2024). Berdasarkan literatur review yang ditemukan maka terdapat dua aliran utama yaitu, menekankan kontribusi ekonomi industri sawit terhadap pembangunan nasional, dan di disisi lain menyoroti konsekuensi ekologis deforestasi akibat ekspansi sawit dan kelemahan regulasi.

Dari pembahasn di atas, bisa disimpulkan secara umum literatur akademik menunjukkan dua kecenderungan utama. Pertama, sawit dipandang sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, ekspansi sawit berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi lingkungan. Namun, hubungan antara kedua dimensi tersebut masih jarang dianalisis dalam kerangka politik lingkungan yang menyoroti relasi kuasa dan proses pembentukan kebijakan.

Pembahasan

Ekonomi Politik Industri Kelapa Sawit

Deforestasi tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi ekonomi politik perkebunan kelapa sawit yang menempatkan komoditas ini sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai komoditas ekspor utama yang menghasilkan devisa besar dan menyerap tenaga kerja dalam skala luas. Perluasan areal perkebunan sawit berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama juga berkaitan erat dengan deforestasi dan degradasi lingkungan. Deforestasi yang ditimbulkan merupakan salah satu faktor penting yang mempercepat perubahan iklim, karena perubahan lahan hutan menjadi lahan perkebunan sawit mengurangi fungsi ekologis hutan dalam menyimpan karbon dan menjaga keanekaragaman hayati (Ronaully, 2024). Ekspansi industri kelapa sawit sejak awal dekade 2000-an menjadi salah satu pendorong utama deforestasi nasional, dengan estimasi kehilangan sekitar 9,75 juta hektar tutupan hutan. Kondisi ini mencerminkan orientasi pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam sebagai prioritas utama.

Hasil penelitian Ronaully (2024) menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan kelapa sawit yang keberlanjutan melalui pendekatan *profit, people, dan planet* lebih banyak dioperasionalkan sebagai kerangka normatif dibandingkan pedoman substantif kebijakan. Pilar ekonomi memperoleh prioritas dominan, sementara perlindungan lingkungan cenderung ditempatkan sebagai aspek pendukung. Kondisi ini menandakan bahwa wacana keberlanjutan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik politik ekonomi sawit, sehingga deforestasi tetap diproduksi sebagai konsekuensi struktural dari ekspansi industri.

Dalam perspektif politik lingkungan, ekspansi sawit beroperasi sebagai mekanisme akumulasi kapital yang dilegitimasi oleh negara melalui kebijakan pembangunan berbasis sumber daya alam. Ketergantungan ekonomi terhadap sawit menciptakan tekanan politik bagi pembuat kebijakan untuk mempertahankan iklim

investasi, sering kali dengan mengorbankan konsistensi perlindungan hutan. Relasi ini menegaskan bahwa deforestasi bukan semata akibat lemahnya kapasitas teknis pengelolaan, melainkan hasil dari pilihan politik yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan ekologis jangka panjang. Komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan kerap berhenti pada tataran deklaratif dan sertifikasi formal, tanpa disertai perubahan mendasar dalam relasi kuasa antara negara dan korporasi sawit. Ketidakseimbangan ini memperkuat argumen bahwa deforestasi di Indonesia merupakan manifestasi dari politik ekonomi ekstraktif, di mana perlindungan lingkungan berfungsi lebih sebagai legitimasi kebijakan daripada instrumen transformasi struktural.

Kesenjangan Implementasi Kebijakan Lingkungan

Instrumen kebijakan yang dirancang untuk mengendalikan ekspansi sawit dan menekan deforestasi, seperti Moratorium Izin Baru Sawit melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 dan Kebijakan Satu Peta, secara normatif menunjukkan komitmen negara terhadap perbaikan tata kelola lingkungan. Temuan di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan yang signifikan. Regulasi tersebut cenderung berhenti pada tataran administratif dan simbolik, sementara praktik pembukaan lahan ilegal, tumpang tindih tata ruang, dan konflik agraria tetap berlangsung di tingkat lokal. Kesenjangan implementasi ini bersifat struktural dan berkaitan erat dengan dinamika desentralisasi kewenangan, yang membuka ruang negosiasi politik antara pemerintah daerah dan kepentingan korporasi.

Kegagalan implementasi kebijakan lingkungan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *regulatory capture*. Penjeratan regulasi terjadi ketika lembaga negara yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas justru dipengaruhi oleh kepentingan industri yang diawasi (Stigler, 1971). Dalam sektor perkebunan sawit, pengaruh korporasi terhadap proses perizinan dan pengawasan menyebabkan lemahnya penegakan hukum serta pembiaran terhadap pelanggaran tata ruang dan kawasan lindung. Korupsi berperan sebagai mekanisme yang memperkuat penjeratan regulasi melalui praktik suap dan kolusi antara aktor negara dan pelaku usaha. Sejalan dengan analisis Peluso dan Lund (2011), praktik ilegal dalam pengelolaan sumber daya alam kerap memperoleh legitimasi *de facto* melalui otoritas politik lokal, sehingga kerusakan ekologis dinormalisasi sebagai bagian dari proses pembangunan.

Dalam konteks industri kelapa sawit Indonesia, *regulatory capture* tidak hanya terjadi melalui hubungan langsung antara korporasi dan regulator, tetapi juga melalui ketergantungan ekonomi pemerintah terhadap sektor sawit. Kontribusi industri sawit terhadap devisa negara, investasi, penerimaan daerah, dan penyerapan tenaga kerja menciptakan insentif politik bagi pemerintah untuk mempertahankan ekspansi industri tersebut. Kondisi ini menyebabkan kebijakan lingkungan sering kali berada dalam posisi subordinat terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan menjadi kurang efektif dan berbagai bentuk penyimpangan tata ruang lebih mudah ditoleransi. Relasi semacam ini menunjukkan bahwa persoalan deforestasi tidak hanya berkaitan dengan lemahnya kapasitas pengawasan negara, tetapi juga dengan

struktur insentif politik dan ekonomi yang mendorong keberlanjutan model pembangunan ekstraktif.

Kasus di Kota Subulussalam, Aceh, khususnya di kawasan hutan lindung yang termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser, memberikan bukti empiris mengenai dinamika politik ekstraksi di tingkat lokal. Aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh PT Sawit Panen Terus tercatat telah mengakibatkan hilangnya sekitar 1.655 hektar hutan lindung. Keberlanjutan aktivitas tersebut menunjukkan bahwa status perlindungan kawasan tidak secara otomatis menjamin keberlanjutan ekologis ketika pengawasan negara lemah dan kepentingan ekonomi korporasi lebih diakomodasi. Temuan-temuan dalam literatur politik lingkungan mengindikasikan bahwa peran negara dalam tata kelola sumber daya alam sering kali dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih menguntungkan aktor ekonomi yang memiliki sumber daya dan akses politik yang lebih besar.

Klaim pemerintah mengenai keberhasilan penurunan laju deforestasi di tingkat nasional perlu dibaca secara kritis. Penurunan angka deforestasi secara agregat berpotensi menciptakan ilusi perbaikan lingkungan, sementara konflik agraria dan degradasi ekologi terus berlangsung di kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi. Dalam perspektif kritik terhadap ecological modernization dan green developmentalism, wacana keberlanjutan sering kali berfungsi sebagai strategi legitimasi politik yang tidak disertai perubahan struktural dalam relasi kuasa antara negara dan korporasi (Hajer, 1995; Brand & Wissen, 2013). Kebijakan lingkungan kehilangan sifat transformatifnya dan lebih berperan sebagai instrumen pembenaran bagi ekspansi industri berbasis sumber daya alam.

Aktor Lokal dalam Politik Deforestasi: Petani Sawit Rakyat dan Masyarakat Lokal

Ekspansi industri kelapa sawit dalam konteks deforestasi tidak hanya melibatkan negara dan korporasi berskala besar, tetapi juga aktor lokal yang memiliki posisi strategis sekaligus rentan, khususnya petani sawit rakyat dan masyarakat lokal. Dalam banyak kajian politik lingkungan, petani kecil sering diposisikan sebagai korban pasif dari ekspansi modal, padahal keterlibatan mereka dalam alih fungsi lahan kerap berlangsung melalui proses yang lebih kompleks dan tidak sepenuhnya koersif. McCarthy (2010) menunjukkan bahwa petani sawit rakyat di Indonesia beroperasi dalam struktur pasar dan kebijakan yang mendorong mereka mengadopsi sawit sebagai strategi bertahan hidup ekonomi. Keterbatasan akses terhadap lahan produktif, modal, dan dukungan negara membuat sawit menjadi komoditas yang relatif menjanjikan dibandingkan pilihan ekonomi lainnya. Dalam kondisi tersebut, keputusan membuka lahan baru sering kali merupakan respons terhadap tekanan struktural, bukan semata pilihan individual yang bebas nilai. Relasi ini memperlihatkan bahwa deforestasi juga diproduksi melalui dinamika ekonomi-politik di tingkat lokal.

Ketergantungan ekonomi masyarakat lokal terhadap sawit diperkuat oleh konfigurasi kebijakan dan pasar yang menguntungkan ekspansi monokultur dibandingkan sistem penggunaan lahan berbasis keragaman. Li (2014) menjelaskan bahwa proses “development as dispossession” tidak selalu berlangsung melalui

pengusiran langsung, melainkan melalui pembentukan kondisi di mana masyarakat terdorong untuk menyerahkan atau mengonversi lahannya demi integrasi ke dalam ekonomi komoditas. Skema kemitraan antara perusahaan dan petani plasma sering dipresentasikan sebagai solusi inklusif, namun dalam praktiknya menciptakan hubungan asimetris yang membatasi otonomi petani atas tanah dan produksi. Ketika harga sawit berfluktuasi dan biaya produksi meningkat, risiko ekonomi lebih banyak ditanggung oleh petani kecil, sementara perusahaan mempertahankan posisi dominan dalam rantai nilai. Situasi ini memperlihatkan bagaimana aktor lokal tidak sepenuhnya berada di luar sistem ekstraktif, melainkan terjerat di dalamnya. Deforestasi dalam konteks ini muncul sebagai hasil interaksi antara kebutuhan ekonomi lokal dan struktur pasar yang timpang.

Selain petani sawit rakyat, masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hutan juga mengalami transformasi relasi sosial dan ekologis akibat ekspansi sawit. Peluso dan Lund (2011) menekankan bahwa klaim atas lahan dan sumber daya alam merupakan arena politik yang terus diperebutkan, di mana legalitas formal sering kali tidak sejalan dengan legitimasi sosial. Dalam banyak kasus, hilangnya akses terhadap hutan tidak hanya berdampak pada sumber penghidupan, tetapi juga pada pengetahuan ekologis, praktik budaya, dan relasi sosial komunitas. Ketika hutan direduksi menjadi lahan produksi, fungsi ekologis dan sosialnya mengalami penyempitan makna yang signifikan. Konflik yang muncul tidak selalu bersifat vertikal antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga horizontal antarwarga akibat perebutan lahan dan perbedaan kepentingan ekonomi. Dinamika ini menunjukkan bahwa dampak deforestasi di tingkat lokal bersifat berlapis dan tidak homogen.

Dalam kerangka politik lingkungan, keterlibatan aktor lokal dalam deforestasi perlu dipahami sebagai bagian dari relasi kuasa yang lebih luas, bukan sebagai penyebab tunggal atau pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab. Pacheco et al. (2017) menegaskan bahwa integrasi petani kecil ke dalam rantai nilai global sawit sering berlangsung tanpa perlindungan institusional yang memadai, sehingga memperdalam kerentanan sosial dan ekologis. Negara memainkan peran penting dalam membentuk kondisi tersebut melalui kebijakan agraria, tata ruang, dan dukungan ekonomi yang cenderung berpihak pada ekspansi industri. Ketika perlindungan hak atas tanah lemah dan alternatif ekonomi berkelanjutan tidak tersedia, masyarakat lokal berada dalam posisi sulit untuk menolak konversi hutan. Relasi ini memperkuat argumen bahwa deforestasi merupakan hasil dari konfigurasi politik-ekonomi yang menormalisasi ekstraksi sumber daya di berbagai skala. Dengan demikian, analisis aktor lokal menjadi kunci untuk memahami bagaimana krisis ekologi direproduksi dalam praktik pembangunan sehari-hari.

Dimensi Politik Lingkungan Global dan Tekanan Pasar Internasional

Deforestasi yang berkaitan dengan ekspansi kelapa sawit di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lingkungan global yang membentuk pola produksi dan konsumsi komoditas tersebut. Permintaan minyak sawit sebagian besar berasal dari pasar internasional, terutama untuk industri pangan, kosmetik, dan bioenergi di negara-negara maju. Dalam kerangka ekonomi politik global,

Indonesia menempati posisi sebagai produsen bahan mentah yang terintegrasi ke dalam rantai nilai global dengan daya tawar yang terbatas (Pacheco et al., 2017). Struktur ini menciptakan tekanan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi dan menjaga daya saing harga, yang sering kali diterjemahkan ke dalam perluasan areal perkebunan. Ketika pertumbuhan ekonomi nasional bergantung pada devisa ekspor sawit, kepentingan ekologis cenderung berada dalam posisi subordinat. Relasi tersebut memperlihatkan bahwa deforestasi juga diproduksi oleh mekanisme pasar global yang bekerja lintas batas negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan global terhadap isu deforestasi mengalami peningkatan melalui berbagai inisiatif keberlanjutan dan regulasi perdagangan. Kebijakan Uni Eropa terkait produk bebas deforestasi, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), dipresentasikan sebagai instrumen untuk mengurangi kerusakan hutan di negara produsen. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa standar keberlanjutan global kerap dibangun berdasarkan kepentingan dan perspektif negara konsumen, tanpa mempertimbangkan secara memadai kondisi sosial ekonomi di negara berkembang (Hajer, 1995; Brand & Wissen, 2013). Persyaratan teknis dan administratif yang ketat berpotensi mengecualikan petani kecil dari pasar global karena keterbatasan kapasitas dan biaya kepatuhan. Dalam konteks ini, keberlanjutan berfungsi sebagai mekanisme seleksi pasar yang tidak netral secara politik. Tekanan global tersebut menciptakan ketimpangan baru dalam distribusi risiko dan manfaat ekonomi sawit.

Wacana lingkungan global juga sering kali mengaburkan tanggung jawab negara-negara konsumen terhadap krisis ekologis yang terjadi di wilayah produsen. Dauvergne dan Neville (2010) menekankan bahwa konsumsi berlebihan di negara maju memainkan peran penting dalam mendorong ekspansi komoditas berbasis lahan di Global South. Namun, fokus kebijakan internasional lebih banyak diarahkan pada perubahan praktik produksi dibandingkan pembatasan konsumsi. Pola ini menciptakan narasi bahwa deforestasi merupakan kegagalan tata kelola negara produsen semata, sementara relasi struktural dalam sistem perdagangan global jarang dipertanyakan. Dalam kondisi tersebut, Indonesia berada dalam posisi defensif untuk menyeimbangkan tuntutan lingkungan global dengan kepentingan pembangunan nasional. Ketegangan ini memperlihatkan bagaimana isu deforestasi dipolitisasi dalam arena global yang sarat kepentingan ekonomi.

Dalam perspektif politik lingkungan, tekanan pasar internasional terhadap sawit berkelanjutan tidak dapat dipahami semata sebagai upaya teknokratis perlindungan lingkungan. Robbins (2012) menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan global seringkali mencerminkan relasi kuasa yang memungkinkan negara-negara maju mempertahankan posisi dominan dalam sistem ekonomi dunia. Standar hijau global berpotensi mereproduksi ketergantungan struktural dengan memindahkan beban penyesuaian ekologis ke negara produsen tanpa redistribusi keuntungan yang adil. Di tingkat nasional, tekanan tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan sertifikasi dan komitmen keberlanjutan yang lebih berorientasi pada akses pasar dibandingkan transformasi ekologis. Situasi ini menunjukkan bahwa dimensi global tidak hanya membentuk arah industri sawit, tetapi juga membatasi ruang kebijakan domestik. Dengan demikian, deforestasi di Indonesia perlu dibaca sebagai bagian

dari krisis ekologis global yang berakar pada ketimpangan politik dan ekonomi internasional.

Kritik terhadap Wacana Keberlanjutan dan Sertifikasi Sawit

Wacana keberlanjutan dalam industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika domestik, tetapi juga oleh kebutuhan untuk memperkuat legitimasi produk di pasar internasional, terutama di tengah kritik global terkait deforestasi dan pelanggaran hak masyarakat lokal. Riset primer menunjukkan bahwa tujuan sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah untuk meningkatkan praktik pengelolaan lahan yang lebih bertanggung jawab serta daya saing produk Indonesia di pasar global, namun realitas pelaksanaannya masih penuh tantangan struktural. Studi literatur menyatakan bahwa implementasi sertifikasi masih menghadapi hambatan terkait pemahaman prinsip keberlanjutan oleh petani dan perusahaan serta rendahnya kapasitas pelaksanaan di tingkat tapak. Selain itu, standar sertifikasi seringkali belum diikuti oleh penegakan hukum yang kuat yang dapat mencegah terjadinya konversi hutan tanpa kontrol yang ketat, sehingga dampak ekologis tetap tinggi meskipun sertifikasi diklaim telah diterapkan. Kesenjangan antara tuntutan formal sertifikasi dengan praktik lapangan ini menunjukkan bahwa wacana keberlanjutan sering kali lebih menjadi perangkat administratif daripada alat transformasi ekologis yang efektif. Penelitian semacam ini merefleksikan kompleksitas nyata dalam usaha menjadikan sertifikasi sebagai mekanisme perlindungan lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan pertanian di Indonesia.

Pada tataran implementasi, penelitian empiris menunjukkan bahwa sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO di tingkat petani sawit swadaya menghadapi berbagai kendala operasional yang signifikan, termasuk rendahnya pemahaman petani terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan biaya yang masih dianggap tinggi. Hasil tinjauan empiris terhadap penerapan sertifikasi oleh perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia menemukan bahwa beberapa faktor penghambat utama adalah keterbatasan pengetahuan tentang praktik pertanian berkelanjutan, lemahnya organisasi kelembagaan petani, serta persepsi bahwa sertifikasi merupakan beban ekonomi yang hanya layak bagi perkebunan besar. Kondisi seperti ini meningkatkan risiko bahwa sertifikasi hanya akan berdampak positif jika dukungan kapasitas dan insentif material diberikan secara memadai pada kelompok petani kecil. Ini menggarisbawahi bahwa skema keberlanjutan yang ada belum mampu menjawab tantangan struktural dalam produksi sawit secara adil dan merata. Ketidaksiapan pelaku lokal ini mencerminkan bahwa sertifikasi masih lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan daripada sebagai instrumen perubahan praksis pertanian sawit yang berkelanjutan.

Evaluasi terhadap strategi implementasi sertifikasi nasional ISPO juga menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam tata kelola yang berdampak pada efektivitas sertifikasi sebagai alat keberlanjutan. Analisis SWOT terhadap strategi ISPO di Provinsi Jambi, misalnya, mengungkapkan bahwa pelaksanaan ISPO di lapangan masih terkendala rendahnya tingkat adopsi, kurangnya dukungan sumber daya, dan tantangan pemenuhan indikator verifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun ISPO dimaksudkan sebagai sistem sertifikasi yang tepat untuk konteks lokal Indonesia, kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas pelaksanaannya memunculkan kerentanan dalam upaya mencapai tujuan ekologis. Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar instansi dan kurangnya insentif bagi petani untuk meningkatkan praktik produksi mereka. Konteks ini memperlihatkan bahwa tanpa pendekatan yang lebih holistik dan dukungan implementatif yang nyata, sertifikasi berisiko menjadi prosedur administratif belaka.

Beberapa studi kasus korporasi juga menunjukkan bahwa sertifikasi tidak selalu menjamin praktek yang benar-benar meminimalkan dampak sosial dan lingkungan. Misalnya, kajian terhadap peran ISPO dan RSPO dalam konteks perusahaan besar seperti di kasus Indofood menunjukkan adanya kesulitan dalam monitoring dan penegakan hukum yang konsisten, terutama terkait aspek lingkungan dan hak asasi manusia. Studi ini menyoroti bahwa meskipun sertifikasi diberikan, hambatan dalam pelaksanaan dan pengawasan membuat prinsip keberlanjutan sulit terealisasi secara menyeluruh dalam operasi perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan yang diklaim oleh sertifikasi sering kali terbatas pada dokumen dan audit eksternal, tanpa perubahan signifikan dalam praktik operasional perusahaan. Hal ini mempertanyakan kemampuan skema sertifikasi untuk menangani isu yang lebih mendasar seperti konflik lahan dan pelanggaran hak masyarakat adat yang terkait dengan ekspansi perkebunan.

Studi yang membahas inklusi petani swadaya melalui sertifikasi ISPO menunjukkan bahwa sertifikasi memang dapat mendorong formalisasi lahan dan akses informasi, namun ini hanya terjadi bila terdapat dukungan kelembagaan dan kepastian pasar yang jelas. Tanpa kondisi tersebut, sertifikasi cenderung memperkuat ketimpangan antara pelaku usaha sawit besar dan petani lokal yang kurang terorganisir karena keterbatasan modal dan jaringan pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa skema keberlanjutan yang ada belum secara efektif menjadi pintu masuk bagi petani kecil untuk memperoleh manfaat ekonomi yang sejajar. Dengan demikian, kritik terhadap wacana keberlanjutan tidak sekadar soal label, tetapi juga tentang bagaimana sertifikasi diintegrasikan secara nyata dalam struktur produksi dan distribusi sawit Indonesia.

Menuju Arah Kebijakan yang Lebih Transformatif

Upaya merespons deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit menuntut pergeseran kebijakan dari pendekatan korektif menuju transformasi struktural dalam tata kelola sumber daya alam. Sejumlah studi menekankan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada pengendalian dampak lingkungan tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan deforestasi yang bersifat sistemik (Busch & Ferretti-Gallon, 2020). Selama ekspansi lahan tetap menjadi strategi utama peningkatan produksi, tekanan terhadap kawasan hutan akan terus berlanjut. Pendekatan transformatif menuntut pembatasan eksplisit terhadap perluasan perkebunan sawit, terutama di wilayah bernilai konservasi tinggi dan kawasan hutan tersisa. Dalam konteks ini, perlindungan hutan tidak diposisikan sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai prasyarat keberlanjutan jangka panjang. Pergeseran ini membutuhkan keberanian politik untuk menata ulang prioritas pembangunan nasional.

Selain pembatasan ekspansi, intensifikasi produksi yang berkelanjutan sering dipromosikan sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap hutan. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa intensifikasi hanya efektif dalam menekan deforestasi apabila disertai dengan regulasi tata ruang yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten (Austin, Schwantes, Gu, & Kasibhatla, 2019). Tanpa kerangka pengendalian yang kuat, peningkatan produktivitas justru dapat menciptakan insentif ekonomi baru untuk membuka lahan tambahan. Oleh karena itu, intensifikasi perlu dipahami sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas, bukan solusi tunggal. Kebijakan pertanian harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas di lahan eksisting sambil menutup peluang ekspansi ilegal. Relasi antara produktivitas dan perlindungan hutan menjadi isu politik yang memerlukan intervensi negara secara aktif.

Pendekatan kebijakan yang lebih transformatif juga menuntut penguatan reforma agraria berbasis ekologi sebagai respons terhadap ketimpangan akses lahan. Studi menunjukkan bahwa ketidakpastian tenurial merupakan faktor penting yang mendorong deforestasi dan konflik agraria di wilayah perkebunan sawit (Myers et al., 2021). Pengakuan hak atas tanah bagi masyarakat lokal dan adat berpotensi memperkuat insentif perlindungan hutan serta mendorong pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan. Reforma agraria yang berorientasi ekologis tidak hanya berfokus pada distribusi lahan, tetapi juga pada penguatan kapasitas pengelolaan dan akses terhadap sumber daya produktif. Dalam konteks ini, masyarakat lokal diposisikan sebagai subjek pengelolaan lingkungan, bukan sekadar penerima dampak pembangunan. Pendekatan tersebut membuka ruang bagi praktik penggunaan lahan yang lebih adaptif dan beragam.

Di luar sektor sawit, pengembangan model ekonomi alternatif menjadi elemen penting dalam mengurangi ketergantungan struktural terhadap komoditas berbasis lahan. Penelitian terbaru menyoroti potensi agroforestri dan ekonomi hutan berbasis masyarakat sebagai strategi diversifikasi mata pencaharian yang mampu menjaga fungsi ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan lokal (Reed et al., 2020). Model-model ini menawarkan penggunaan lahan yang lebih fleksibel dibandingkan monokultur sawit, dengan risiko ekologis yang relatif lebih rendah. Namun, pengembangan alternatif tersebut sering kali terhambat oleh minimnya dukungan kebijakan, pembiayaan, dan akses pasar. Negara memiliki peran strategis dalam menciptakan insentif dan infrastruktur yang mendukung transisi ini. Tanpa intervensi kebijakan yang jelas, ekonomi alternatif sulit bersaing dengan ekspansi industri sawit.

Dalam kerangka politik lingkungan, arah kebijakan transformatif mensyaratkan perubahan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa dominasi kepentingan industri dalam proses pengambilan keputusan menjadi salah satu penghambat utama reformasi tata kelola lingkungan di Indonesia (Carmenta et al., 2023). Transformasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan desain regulasi, tetapi juga dengan mekanisme partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penguatan peran masyarakat sipil dan aktor lokal menjadi penting untuk menyeimbangkan pengaruh ekonomi dalam arena kebijakan. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan tidak diperlakukan sebagai isu teknis,

melainkan sebagai persoalan politik yang menyangkut distribusi manfaat dan risiko pembangunan. Arah kebijakan yang lebih transformatif bergantung pada kemampuan negara untuk menggeser logika pembangunan dari ekstraksi menuju keberlanjutan yang substantif.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa deforestasi yang berkaitan dengan ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan lingkungan, melainkan sebagai persoalan politik lingkungan yang melibatkan relasi kuasa antara negara, korporasi, masyarakat lokal, dan aktor global. Di satu sisi, industri sawit memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan negara. Namun di sisi lain, ekspansi perkebunan sawit telah mendorong hilangnya tutupan hutan, degradasi lingkungan, konflik agraria, serta meningkatnya tekanan terhadap keberlanjutan ekologis.

Kajian ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan lingkungan yang ditujukan untuk mengendalikan deforestasi, seperti moratorium sawit, sertifikasi keberlanjutan, dan penguatan tata kelola lahan, masih menghadapi berbagai keterbatasan implementasi. Literatur yang dikaji mengindikasikan bahwa lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kepentingan kelembagaan, serta kuatnya pengaruh aktor ekonomi dalam proses kebijakan menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan lingkungan. Dalam konteks tersebut, deforestasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga dengan struktur politik-ekonomi yang membentuk arah pembangunan nasional.

Selain itu, artikel ini menegaskan bahwa aktor lokal, termasuk petani sawit rakyat dan masyarakat adat, tidak dapat diposisikan sebagai penyebab tunggal deforestasi. Keterlibatan mereka perlu dipahami dalam konteks tekanan ekonomi, ketidakpastian tenurial, dan integrasi ke dalam rantai nilai industri sawit yang lebih luas. Pada saat yang sama, tekanan pasar internasional dan berbagai agenda keberlanjutan global turut membentuk dinamika tata kelola sawit di Indonesia, meskipun tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Temuan ini memperlihatkan bahwa upaya mengatasi deforestasi memerlukan pendekatan yang lebih transformatif daripada sekadar memperkuat instrumen regulasi. Reformasi tata kelola lingkungan perlu diarahkan pada penguatan penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat lokal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan, serta pengurangan ketergantungan pembangunan terhadap model ekonomi ekstraktif. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif atau tuntutan pasar global, tetapi sebagai agenda politik yang menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Cahyo Seftyono selaku dosen pengampu mata kuliah dinamika pembangunan politik yang telah membantu dalam mengarahkan penulisan artikel penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Antara News. (2024, April 27). *DLHK Aceh: PT SPT diminta lakukan revegetasi di kawasan hutan lindung Subulussalam*.
- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *environmental research letters*, 2-3.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik kelapa sawit Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Busch, J., & Ferretti-Gallon, K. (2020). What drives deforestation and what stops it? A meta-analysis. *Review of Environmental Economics and Policy*, 14(1), 3–23.
- Carmenta, R., Di Gregorio, M., Brockhaus, M., & Pasgaard, M. (2023). Power, participation and representation in environmental governance. *World Development*, 163, 106132.
- Fasya, T. K., Praza, R., & Fariadi, D. (2021). Dampak Sawitisasi Terhadap Lingkungan di Aceh Utara. *Jurnal AGRIFO*, Vol. 7, No, 1 9-10.
- Feninda, T. (2023). Analisis Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 – 2020. *jurnal ekonomi, koperasi, & kewirausahaan*, vol, 14, no. 3, 7-8.
- Filayudha, Y. (2023). Analisis hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia. *Journal of Human and Legal Insights (JHLI)*, 5(1), 1–20.
- Forest Watch Indonesia. (2025). *Analisis keadaan hutan Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- FWI. (2020, juni 5). *Menelisik Angka Deforestasi Pemerintah*. Retrieved from https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr93UL9vURproMBuw9XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1767322366/RO=10/RU=https%3a%2f%2ffwi.or.id%2fmenelisik-angka-deforestasi-pemerintah%2f/RK=2/RS=SFCQbJQR15WoA.TOResgizZJEqE-
- Global Forest Watch. (2023). *Indonesia deforestation data and analysis*.
- Hospes, O. (2021). The shifting politics of sustainable palm oil: From global standards to national initiatives. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1836380>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Status hutan dan kehutanan Indonesia*. Jakarta: KLHK.
- Krisdianto. (2025, maret 21). *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024*. Retrieved from [kehutanan.go.id: https://www.kehutanan.go.id/news/article-10](https://www.kehutanan.go.id/news/article-10)
- Martalita, N. L., Robiani, B., Rohima, S., & Yulianita, A. (2025). Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) Export Dynamics: A 2000–2024 Perspective. *journal growth*, Vol. 11, No. 1, 2-4.

- Myers, R., Larson, A. M., Ravikumar, A., Kowler, L. F., Yang, A., & Trench, T. (2021). Messiness of forest governance: How technical approaches suppress politics in REDD+ and conservation projects. *Global Environmental Change*, 70, 102345
- Noerdin, E., & Mar'iyah, C. (2024). Regulatory Capture by Corporations, Liberalization of Industrial Forest Sector and Deforestation in Indonesia. *journal of humanities and social sciences studies*, Vol. 6, no. 7, 7-8.
- Nusantara Atlas. (2024). *Monitoring deforestasi di Kawasan Ekosistem Leuser*. Jakarta: Yayasan HAKA & TheTreeMap.
- Obidzinski, K., Dermawan, A., Hadianto, A., & Andrianto, A. (2020). Oil palm plantation development in Indonesia: The nexus of politics, economics, and deforestation. *Land Use Policy*, 99, 104850. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104850>
- Pacheco, P., Gnych, S., Dermawan, A., Komarudin, H., & Okarda, B. (2017). The palm oil global value chain: Implications for economic growth and social and environmental sustainability. *Center for International Forestry Research (CIFOR)*.
- Pacheco, P., Gnych, S., Dermawan, A., Komarudin, H., & Okarda, B. (2022). The palm oil global value chain: Implications for economic growth and social and environmental sustainability. *Forest Policy and Economics*, 135, 102640.
- Putri, E. I. (n.d.). *Pengenalan tentang Ekonomi –Ekologi – Lingkungan*. Retrieved from [pustaka.ut.ac.id: https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4310-M1.pdf](https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4310-M1.pdf)
- Rahman, F. Y., & Zahra, H. F. (2022). Analisis Penyebab, Dampak, Serta Upaya Pengurangan Deforestasi Hutan Di Indonesia. *Jurnal SDGs 15 UPN Veteran Jakarta*, 3-4.
- Reed, J., van Vianen, J., Deakin, E. L., Barlow, J., & Sunderland, T. (2020). Integrated landscape approaches to managing social and environmental issues in the tropics. *Global Change Biology*, 26(6), 3294–3306.
- Riani, U. S., & Dermawan, A. (2025). Pengaruh Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2023. *jurnal agribisnis*, vol. 18, no1, 2-3.
- Ruyschaert, D., & Salles, D. (2021). The strategies and effectiveness of certification in the palm oil sector. *World Development*, 140, 105258.
- Sunderlin, W. D., & Resosudarmo, I. A. (1997). Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya. *Center For International Forestry Research*, 7-8.
- Ulfa, D. F., & Iksanto, M. A. (2018). Integrasi Good Forest Governance Dalam Tata Kelola Industri Kelapa Sawit di Tengah Isu Deforestasi di Indonesia. *skripsi. Universitas gadjah mada*, 10-12.
- Ulfa, D. F., & Iksanto, M. A. (2020). Integrating good forest governance into palm oil management amid deforestation issues in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 123–137.
- Widiono, S. (2024). Oil Palm Plantation Expansion and Population Problems: An Explanatory Factor for Deforestation in Indonesia. *dynamics of rural society journal*, 6-8.

Tentang Penulis

***dihapus oleh Editor**